

## Proses penerimaan dan pemberhentian pada Bank Dagang Negara dibandingkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Johny R.D. Siwalette, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204521&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Dalam rangka penyelenggaraan penerimaan dan pemberhentian pegawai pada Bank Dagang Negara, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara pengaturan penerimaan caranya adalah maupun pemberhentian pegawai secara tertib, proses atau pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu perlu disusun pedoman dan peraturan yang prinsipil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip teoritis. Pandangan tersebut, menyusun skripsi ini dengan judul dan Pemberhentian menarik perhatian penulis untuk Proses Penerimaan Pegawai Pada Bank Dagang Negara dibandingkan dengan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. Metode yang digunakan bagi pengumpulan data dalam penulisan ini, deskriptif analitis, dengan kepustakaan, yaitu dengan dan peraturan - peraturan, adalah secara cara melakukan penelitian memanfaatkan buku - buku serta melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan serangkaian wawancara dengan pihak yang berwenang di lingkungan BDN. Dari hasil penelitian terhadap penyelenggaraan penerimaan dan pemberhentian pegawai pada BDN tersebut, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut : Kesalahan pengertian mengenai status pegawai pada umumnya oleh pegawai BDN, kemudian rangka penerimaan dikenal adanya yaitu penerimaan bagi mereka dalam penerimaan khusus, yang berprestasi olah raga; hal lain yang ditemukan, yaitu dalam rangka pemberhentian pegawai di karena pensiun dibutuhkan, mana pegawai yang diberhentikan masih dapat dipekerjakan kembali jika dengan status sebagai Berdasarkan penelitian-penelitian maka dapat disimpulkan pegawai honorer, serta temuan tersebut, bahwa proses penyelenggaraan penerimaan dan pemberhentian pegawai pada Negara, Bank Dagang masih perlu ditingkatkan memenuhi harapan akan pegawai lagi, agar dapat yang trampil sesuai dengan tujuan. Effisiensi dan efektifitas dalam rangka penerimaan dan pemberhentian pegawai hanya dapat diperoleh, apabila sesuai dengan proses penyelenggaraannya dijalankan prinsip-prinsip dan yang ada dan berhubungan dengan hal peraturan-peraturan tersebut di atas.